

Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Hemat untuk Rakyat atau Dana untuk Aparat?

Pengantar

Pada 22 Januari 2025 lalu Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025). Dalam poin kedua huruf a bahwa perlu adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Sementara itu, pada poin ketiga angka 2 dijelaskan bahwa pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan non operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Pemotongan anggaran tentunya perlu didukung dengan mempertimbangkan analisis yang tepat dan mengukur implikasi yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Mengingat potensi korupsi dalam penggunaan anggaran yang cukup tinggi, penting untuk mengidentifikasi anggaran mana yang memiliki risiko tinggi terjadinya korupsi. Namun, keluarnya Inpres 1/2025 patut diduga tanpa adanya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, misal anggaran pertemuan yang memboroskan belanja negara, pembelian peralatan yang tidak memiliki urgensi keterpakaian, atau pembayaran insentif bagi pejabat publik dari struktur yang gemuk. Selain itu, patut diduga pemangkasan anggaran tidak melalui proses analisis yang komprehensif dan analisis dampak yang ditimbulkan dari kebijakan efisiensi anggaran.

Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menganalisis bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara terburu-buru. Hal ini dapat terlihat dari dua aspek. **Pertama** pemangkasan anggaran dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi menghambat akses layanan dasar warga. Selain itu, kebijakan efisiensi ini tidak melalui evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Evaluasi penggunaan anggaran secara ideal digunakan untuk mengidentifikasi komponen mana yang tidak tepat sasaran. Tanpa adanya evaluasi, kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi akan memengaruhi layanan publik dan dapat berimplikasi terhadap maladministrasi¹.

Kedua, kebijakan pemangkasan anggaran tidak melalui proses analisis kebermanfaatan, terutama belanja pengadaan di Kementerian/ Lembaga yang tidak relevan dengan masyarakat. Berdasarkan data rencana dan pelaksanaan pengadaan di tahun 2025, ICW menemukan ada sejumlah pengadaan yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan warga. Meskipun telah ada kebijakan yang telah dikeluarkan sejak 22 Januari lalu, namun masih terdapat lelang yang telah selesai dilaksanakan, diantaranya oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

¹ Aturan maladministrasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Oleh sebab itu, ICW melakukan analisis anggaran berbasis rencana dan pelaksanaan pengadaan untuk memberikan fakta bahwa pajak negara yang dibayarkan oleh masyarakat tidak dibayarkan untuk kepentingan publik yang lebih baik.

Metode

ICW mengumpulkan data perencanaan di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemilihan institusi tersebut didasarkan pada besarnya rencana pagu anggaran yang tersedia di SiRUP. Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 5-12 Februari 2025. Data yang dikumpulkan yaitu rencana belanja pengadaan yang nilainya di atas Rp10 miliar dan pengadaan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.

Temuan

Belanja pengadaan merupakan sektor yang memiliki potensi risiko korupsi sangat tinggi. Berdasarkan Laporan Skor Penilaian Integritas tahun 2024 yang baru diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat tinggi. Bentuk penyalahgunaannya antara lain seperti pengaturan tender, adanya kedekatan pejabat publik dengan penyedia, adanya kemahalan harga, adanya gratifikasi atau suap, bahkan hingga hasil pekerjaan yang tidak termanfaatkan.²

Sementara itu, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 pernah menyatakan bahwa pemberian *fee* proyek dengan nilai 5-15 persen merupakan hal yang lazim.³ Jika Presiden Prabowo konsisten untuk melakukan efisiensi anggaran, komponen belanja yang harusnya dipangkas pertama kali adalah pengadaan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data pengadaan oleh ICW, anggaran perencanaan pengadaan di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan sebesar Rp49,6 triliun. Jika merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, maka potensi uang negara yang hilang akibat pemberian *fee* proyek terhadap pengadaan di tiga institusi tersebut sebesar Rp2,4-Rp7,4 triliun.

Apabila diturunkan secara detail, anggaran perencanaan pengadaan paling besar dikelola oleh Kementerian Pertahanan dengan total Rp29,3 triliun, dan diikuti oleh Polri dengan nilai Rp13,5 triliun, dan Kejaksaan sekitar Rp6,7 triliun.

² Wahyu Dewantara Susilo dkk, *Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2024* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024), hal. 51.

³ Krisiandi, "KPK Sebut Bagi-bagi 'Fee' Proyek Pemerintah 5-15 Persen Sudah Lazim," *KOMPAS.com*, March 6, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/06/11192991/kpk-sebut-bagi-bagi-fee-proyek-pemerintah-5-15-persen-sudah-lazim>.

| No | Nama Institusi | Jumlah Paket Pengadaan | Total Pagu Anggaran |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Kementerian Pertahanan | 355 | Rp29,38 triliun |
| 2 | Kepolisian RI | 203 | Rp13,5 triliun |
| 3 | Kejaksaan RI | 46 | Rp6,78 triliun |
| TOTAL | | 604 | Rp49,66 triliun |

Tabel 1. Data olah jumlah paket pengadaan dan pagu anggaran di tiga institusi, sumber: SiRUP LKPP.

Sesuai dengan Inpres 1/2025, terdapat pemotongan anggaran terhadap sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. ICW mengidentifikasi terdapat belanja yang disyaratkan oleh Inpres untuk dipotong tapi faktanya masih tetap direncanakan atau bahkan sedang atau telah dilaksanakan oleh ketiga institusi tersebut. Belanja yang paling besar dan tetap direncanakan yakni pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp26,8 triliun, disusul dengan belanja operasional perkantoran sekitar Rp18,5 triliun. Selain itu, belanja lainnya yakni pembangunan infrastruktur Rp2,8 triliun dan belanja pemeliharaan sekitar Rp1,52 triliun.

| No | Kategori Belanja | Jumlah Paket Pengadaan | Total Pagu Anggaran |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Pengadaan peralatan dan mesin | 224 | Rp26,81 triliun |
| 2 | Operasional Perkantoran | 262 | Rp18,51 triliun |
| 3 | Pembangunan Infrastruktur | 83 | Rp2,8 triliun |
| 4 | Pemeliharaan | 35 | Rp1,52 triliun |
| TOTAL | | 604 | Rp49,66 triliun |

Tabel 2. Data olah kategorisasi belanja di tiga institusi, sumber: SiRUP LKPP.

Jika dianalisis lebih mendalam, tergambar pola masing-masing institusi membelanjakan uang negara untuk kepentingan apa. Misal, Kementerian Pertahanan merencanakan lebih besar untuk belanja operasional perkantoran dengan nilai Rp14,82 triliun dan disusul untuk belanja pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp12,34 triliun. Salah satu komponen pengadaan yang sangat besar yakni belanja bahan bakar minyak dan pelumas dengan total pagu senilai Rp5,44 triliun. Sementara itu, komponen rencana belanja Kepolisian RI paling besar pada pengadaan peralatan dan mesin sekitar Rp8,7 triliun dan diikuti dengan belanja operasional perkantoran sekitar Rp3,52 triliun. Hal yang sama tergambar dari perencanaan yang dilakukan oleh Kejaksaan, yakni menganggarkan Rp5,74 triliun untuk pengadaan peralatan dan mesin.

| Institusi | Kategori | Total Pagu |
|-----------|----------|------------|
|-----------|----------|------------|

| | | Anggaran |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Kementerian Pertahanan | Operasional perkantoran | Rp14,82 triliun |
| | Pengadaan peralatan dan mesin | Rp12,34 triliun |
| | Pemeliharaan | Rp1,31 triliun |
| | Pembangunan infrastruktur | Rp1,08 triliun |
| Kepolisian RI | Pengadaan peralatan dan mesin | Rp8,73 triliun |
| | Operasional perkantoran | Rp3,52 triliun |
| | Pembangunan infrastruktur | Rp848,78 miliar |
| | Pemeliharaan | Rp395,74 miliar |
| Kejaksaan RI | Pengadaan peralatan dan mesin | Rp5,74 triliun |
| | Pembangunan infrastruktur | Rp873,77 miliar |
| | Operasional perkantoran | Rp169,3 miliar |
| TOTAL | | Rp49,66 triliun |

Tabel 3. Data olah belanja di tiga institusi sesuai kategori, sumber: SiRUP LKPP.

Dari tabel di atas, sejumlah pengadaan peralatan dan mesin yang dibeli tidak ada kaitannya dengan kepentingan warga. Narasi Presiden Prabowo yang selalu menyampaikan tentang penghematan untuk kepentingan rakyat⁴ pada akhirnya tidak tercermin dari kebijakan yang ia keluarkan. ICW mengidentifikasi terdapat sejumlah pengadaan yang diantaranya dibeli bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan sebaliknya atau tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat secara langsung. Misal, terdapat beberapa rencana pembelian alat *surveillance* yang dilakukan di tiga institusi tersebut. Selain itu, terdapat rencana pembelian seperti pengadaan helikopter (apache, avionics, dst), pembelian senjata dan amunisi, pembelian kendaraan untuk pengawalan, dan pembelian alat material khusus. Berikut sejumlah daftar rencana pengadaan yang teridentifikasi dari laman SiRUP LKPP.

| Institusi | Nama Paket | Pagu Anggaran |
|------------------------|--|----------------------|
| Kementerian Pertahanan | Pengadaan penyiapan helikopter dan modifikasi Avionics Bell-412 beserta sucad pesud dan heli | Rp450 miliar |
| | Pembayaran Lanjutan Helikopter | Rp340 miliar |

⁴ Hadi, Fadjar. "Prabowo: Saya Penghematan Anggaran Demi Rakyat, Tapi Ada Raja Kecil Melawan Saya." *Kumparan*, February 10, 2025.

<https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-saya-penghematan-anggaran-demi-rakyat-tapi-ada-raja-kecil-melawan-saya-24TRczWy4Hm>.

| | | |
|---------------|--|----------------|
| | Apache | |
| | Pengadaan modifikasi Avionic dan harwat helikopter AS 565 Panther beserta sucad | Rp300 miliar |
| | Pengadaan Senjata dan Amunisi Khusus Untuk Kolatmar-Dissenlekal | Rp100 miliar |
| | Pengadaan Senjata Lawan Tank RPG-75 RTB-Dissenlekal | Rp100 miliar |
| Kepolisian RI | Almatsus Dittipidnarkoba | Rp2,57 triliun |
| | Almatsus Bareskrim Polri | Rp1,1 triliun |
| | Pengembangan monitoring digital peralatan penunjang program harkamtibmas pada satuan wilayah Jawa, Bali, dan NTB | Rp99,98 miliar |
| | Pengadaan ranmor R4 sedan pengawalan 2000-3000 cc Sat PJR Korlantas Polri T.A. 2025 | Rp87,5 miliar |
| | Tongkat Baton Sabhara APBN T.A. 2025 | Rp70,2 miliar |
| Kejaksaan RI | Pengadaan Intelligence Airborne Reconnaissance Surveillance | Rp303 miliar |
| | Advanced Spyware Technology For Enhanced Intelligence Surveillance In Prosecutorial Investigations | Rp250 miliar |
| | Pengadaan Peralatan Kontra Intelijen Jammer Sellular untuk Kejaksaan Negeri | Rp200 miliar |
| | Pekerjaan Pembangunan Sistem Naratif Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta | Rp200 miliar |
| | Pengadaan Peralatan Mobile Operasi Intelligent Monitoring Signal Tracing | Rp100 miliar |

Tabel 4. Data olah contoh rencana belanja di tiga institusi berkaitan dengan alat surveillence, helikopter, kendaraan, dan senjata, sumber: SIRUP LKPP.

Meskipun data di atas masih dalam kerangka perencanaan, namun tidak ada jaminan bahwa pengadaan tersebut akan dipangkas. Sebab, berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, ditemukan beberapa pengadaan sedang masuk atau telah selesai dalam proses lelang yang nilainya lebih dari Rp1 triliun. Hal ini

menguatkan dugaan bahwa narasi mengutamakan kepentingan rakyat tidak sepenuhnya benar, karena pada sisi lain ia lebih mengutamakan sektor keamanan dan pertahanan.

Penutup

Narasi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menyampaikan penghematan uang negara untuk rakyat hanya pepesan kosong. Saat ini masih terdapat Rp49,6 triliun pagu anggaran yang diantaranya untuk membiayai alat surveilliance, senjata anti huru-hara di tiga insitusi di atas. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melanjutkannya prosesnya karena hingga saat ini informasi tersebut masih dipublikasikan di laman SiRUP.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran patut diduga bertujuan hanya untuk membiayai program populisnya Prabowo dan untuk sektor keamanan. Padahal, anggaran yang dialokasikan terlalu besar untuk sektor keamanan akan meningkatkan potensi represifitas oleh aparat keamanan dan memperburuk kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, studi yang sama menunjukkan bahwa saat pemerintah membeli alat keamanan dalam jumlah yang besar, maka aparat keamanan akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuatan secara berlebih.⁵ Terlebih mekanisme akuntabilitas di Indonesia cenderung lemah sehingga membuka peluang korupsi yang sangat tinggi.

⁵ Mummolo, J. "Militarization Fails to Enhance Police Safety or Reduce Crime but Increases Civilian Deaths." PNAS, 2018

Lampiran

Gambar 1. Tangkapan layar LPSE Kejaksaan RI yang sedang melakukan proses lelang

The screenshot shows the LPSE Kejaksaan RI interface. At the top, there is a header with the logo of the Indonesian Republic and the text 'LPSE UKPBJ KEJAKSAAN RI'. Below the header, there is a navigation bar with 'BERANDA' and several menu items: 'Apendo/Spamkodok', 'Petunjuk Penggunaan', and 'Aplikasi e-Procurement Lainnya'. The main content area is titled 'Beranda' and features a search bar and a filter for 'Tender Non Tender'. Below this, there is a table of tenders with columns for 'Kode Tender', 'Nama Paket Tender', and 'HPS'. The table lists two tenders: one with code 10013173000 and another with code 10008519000. The footer contains information about the system, including the date '12 Februari 2025 09:40 WIB' and the version 'Aplikasi SPSE v4.5u20250124'.

| Kode Tender | Nama Paket Tender | HPS |
|-------------|---|------------------------|
| 10013173000 | Peralatan Agregasi Data Taktis Intelijen Untuk Pengamanan Informasi Tender spse 4.5 | Rp. 299.999.872.307,52 |
| 10008519000 | Pengadaan alat kontra intelijen untuk pengaman Very-very Important Person Kejaksaan Tinggi Banten Tender spse 4.5 | Rp. 99.999.012.000,00 |

Gambar 2. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang telah selesai melakukan proses lelang

The screenshot shows the LPSE Kepolisian RI interface. At the top, there is a header with the logo of the Indonesian Republic and the text 'LPSE'. Below the header, there is a navigation bar with 'BERANDA' and several menu items: 'Apendo/Spamkodok', 'Petunjuk Penggunaan', and 'Aplikasi e-Procurement Lainnya'. The main content area is titled 'Beranda' and features a search bar and a filter for 'Tender Non Tender'. Below this, there is a table of tenders with columns for 'Kode Tender', 'Nama Tender', and 'Tahap'. The table lists four tenders, all of which are marked as 'Tender Sudah Selesai'. The footer contains information about the system, including the date '12 Februari 2025 14:20 WIB' and the version 'Aplikasi SPSE v4.5u20241107'.

| Kode Tender | Nama Tender | Tahap |
|-------------|---|----------------------|
| 23211044 | SOLUSI PENGEMBANGAN WORKLOAD IAAS PADA PRIVATE CLOUD POLRI UNTUK DATA CENTER CIKEAS POLRI Tender spse 4.5 | Tender Sudah Selesai |
| 23148044 | PENGADAAN PERLENGKAPAN PHH ANTI ANARKHIS PENGAMANAN PEMILU SATBRIMOB POLDA KEP. BABEL DAN POLDA BANTEN BERIKUT PENGIRIMAN T.A. 2024 Tender spse 4.5 | Tender Sudah Selesai |
| 23146044 | PENGADAAN PROFICIENT SUPERVISORY SYSTEM WITH ADVANCED DIGITAL CRIME ACTIVITY LEMDIKLAT POLRI BERIKUT PENGIRIMAN APBN T.A. 2024 Tender spse 4.5 | Tender Sudah Selesai |
| 23131044 | PENGADAAN BORGOL PLASTIK POLDA SULBAR, NTB, KALTARA, NTT, RIAU DAN DIY APBN TA 2024 Tender spse 4.5 | Tender Sudah Selesai |
| 23108044 | Pengadaan Sucad Mel Cat A dan B Pesawat Terbang Beechcraft 1900D/P-4301 Serta A Check Inspection (3000 Hours) Defect Finding And Additional Works Tender spse 4.5 | Tender Sudah Selesai |

Gambar 3. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang sedang melakukan proses lelang

| Kode Tender | Nama Paket Tender | HPS |
|-------------|--|------------------------|
| 26409044 | BIAYA SEWA JARINGAN CCTV KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2025 Tender Ulang spse 4.5 | Rp. 106.554.289.050,00 |
| 26439044 | BIAYA SEWA JARINGAN SMART CITY KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 12.988.143.744,00 |
| 26369044 | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT ANGKUTAN AIR DITPOLAIRUD POLDA KEPRI TA 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 4.678.194.000,00 |
| 25822044 | PAKET 29 KAPOR POLRI TA. 2025 BERUPA SEPATU PDL LANTAS DLL 8 ITEM Tender spse 4.5 | Rp. 5.671.480.600,00 |
| 26297044 | PAKET 38 KAPOR POLRI TA. 2025 BERUPA PECI KORPRI DLL 9 ITEM Tender spse 4.5 | Rp. 4.932.927.260,00 |
| 25379044 | BIAYA SEWA JARINGAN KOMUNIKASI INTERNET BACK OFFICE, CONTACT CENTER, SISLAPOPS DAN OPS SATLANTAS KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 4.789.872.000,00 |
| 26314044 | PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR Tender spse 4.5 | Rp. 4.166.716.000,00 |
| 26444044 | PEMBANGUNAN GEDUNG REHABILITASI NARKOBA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BRIMOB . T A 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 2.899.995.248,52 |
| 26617044 | Pemeliharaan Alat Angkutan Air Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Papua T.A. 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 2.856.000.000,00 |
| 25833044 | PAKET 34 KAPOR POLRI TA. 2025 BERUPA PAKAJAN SAFARI PAMINAL DLL 15 ITEM Tender spse 4.5 | Rp. 2.785.301.800,00 |
| 26248044 | PENGADAAN PEMELIHARAAN KENDARAAN R4 RM DITLANTAS POLDA METRO JAYA TAHUN ANGGARAN 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 2.743.000.000,00 |
| 26400044 | PENGADAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PUSLITBANG POLRI TA. 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 2.585.697.964,00 |
| 26678044 | Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Poinda Lampung Jl Terusan Ryacudu Lampung Selatan TA 2025 Tender spse 4.5 | Rp. 2.532.262.000,00 |
| 26284044 | Rikkes Berkala (Biddokkes) Tender spse 4.5 | Rp. 2.387.825.000,00 |

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan
 Total Pengunjung: 2.992.032
 12 Februari 2025 14:21 WIB
 © 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 Aplikasi SPSE v4.5u20241107

Gambar 4. Tangkapan layar LPSE Kepolisian RI yang telah selesai melakukan proses lelang

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------|---------|
| 25524044 | Pengadaan Almatrus Indonesia Police Directorate of Coastal and Airborne Reconnaissance Surveillance spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 256,3 M |
| 25677044 | Pengadaan Alat Penunjang Keamanan dan Penegakan Hukum Pada Kapal spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 200 M |
| 25526044 | Pengadaan 8 (delapan) unit Kendaraan Pendukung Patroli Taktis Perairan dan Pantai Program APBN T.A.2025 spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 200 M |
| 25366044 | BIAYA CETAK MATERIEL KOMPONEN SIM KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2025 spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 183,3 M |
| 25519044 | Pengadaan Almatrus Optimisation Securement for Command Headquarter Sumber Pembiayaan APBN T.A. 2025 spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 168,7 M |
| 26103044 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Gedung Presisi V Polri Luas 12.310 M² 12 Lantai APBN Slog Polri T.A. 2025 Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - TA 2025 - Tender - Prakuualifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tender Gagal | 162,7 M |

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan
 Total Pengunjung: 2.992.034
 12 Februari 2025 14:22 WIB
 © 2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 Aplikasi SPSE v4.5u20241107

Gambar 5. Tangkapan layar LPSE Kementerian Pertahanan yang sedang melakukan proses lelang

The screenshot displays the LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) interface for the Ministry of Defense. The page title is "Buku Panduan SPSE" (SPSE Guidebook). The main content area is titled "Informasi Penting untuk Penyedia" (Important Information for Suppliers) and provides instructions for suppliers regarding login and order processing. Below this, there is a section for "Beranda - Tender Untuk Anda" (Home - Tenders for You). This section includes a filter for "Tender" and "Non Tender", a search bar, and a table listing active tenders. The table has columns for "Kode Tender", "Nama Paket Tender", and "HPS". Three tenders are listed, each with a value in Indonesian Rupiah (Rp.).

Buku Panduan SPSE LPSE KEMENTERIAN PERTAHANAN

BERANDA

Apendo/Spamkodok Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Procurement Lainnya

Informasi Penting untuk Penyedia

Kepada Penyedia yang memenangkan paket dan berkontrak, silakan login melalui website akun.inaproc.id dan lanjutkan pembuatan pesanan dengan mengakses Katalog Elektronik v6. Mohon gunakan "Kode Verifikasi Pesanan SPSE" untuk menghubungkan transaksi SPSE dengan Katalog Elektronik v6. Kode ini dapat diakses melalui halaman detail paket setelah status Anda ditetapkan sebagai "Pemenang Berkontrak" pada jenis pengadaan **Pekerjaan Konstruksi**.

Silakan hubungi pusat bantuan jika mengalami kendala dalam mengakses atau menggunakan kode verifikasi.

Beranda - Tender Untuk Anda

Tender Non Tender

Tampilan 25 data Cari:

| Kode Tender | Nama Paket Tender | HPS |
|-------------|--|----------------------|
| 10012156000 | Restorasi Ruang Kabalibang, Ruang DWP Gedung Abd Saleh, Kubikal ruang Puslitbang dan ruang Peneliti Gedung Juanda Balitbang Tender spse 4.5 | Rp. 9.759.432.000,00 |
| 10012155000 | Restorasi Ruang Staf Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Juanda, Lantai 1 dan 3 Gd. Soepomo Balitbang Tender spse 4.5 | Rp. 9.680.613.000,00 |
| 10012154000 | Restorasi Mess Sigra, Mess Pamen dan Gudang Balitbang Tender spse 4.5 | Rp. 9.923.895.000,00 |

Tampilan 1 sampai 25 ◀ ▶